

Penerapan analogi dalam hukum pidana Indonesia: analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 786K/Pid/2015 dan 1417K/Pid/1997 = Application of analogical reasoning in Indonesia s criminal law: analysis of Supreme Court of Republic of Indonesia's decision number 786K/Pid/2015 and 1417K/Pid/1997

Hasna Wahida, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20431803&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Pandangan dominan dalam ilmu hukum pidana menyatakan bahwa penerapan analogi dilarang dalam hukum pidana sebab melanggar asas legalitas, sedangkan penafsiran ekstensif diperbolehkan. Skripsi ini menemukan bahwa penerapan analogi dan penafsiran ekstensif memang memiliki perbedaan dalam konteks struktur argumentasi yang dikandung di dalamnya, namun keduanya memiliki persamaan dalam konteks penerapan praktisnya, yaitu sama-sama memperluas cakupan makna suatu ketentuan pidana dalam undang-undang sehingga dapat mencakup perbuatan yang sebelumnya tidak termasuk dalam ketentuan pidana tersebut. Skripsi ini juga menemukan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan analogi dalam Putusan Nomor 786K/Pid/2015 dan 1417K/Pid/1997.

ABSTRACT

The dominant perspective in criminal law propounds that the application of analogical reasoning is prohibited in criminal law, since it is contradictory to principle of legality, whereas extensive interpretation is not prohibited. This thesis finds that application of analogical reasoning is different from extensive interpretation in the context of their own argumentative structure, but they are identical in the context of their practical application, for they both extend the meaning of a criminal provision so it could include an action that was not included in that provision. This thesis also finds that Supreme Court of Republic of Indonesia has applied analogical reasoning in Decision Number 786K/Pid/2015 and 1417K/Pid/1997.